

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam undang-undang tersebut diatur pula bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2022 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 sehingga diperlukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, mewujudkan pencapaian target kinerja daerah, dan optimalisasi pemanfaatan pendapatan/ penerimaan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini adalah:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat triwulan II Tahun 2022

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini adalah:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan bulan Juni yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Berisikan uraian mengenai :

1. Review capaian Renja dan membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan penambahan anggaran;
2. Alasan proses penambahan anggaran;
3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2022 (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi Anggaran BPBD Kota Malang sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp.3.657.117.783,00. Secara ringkas realisasi capaian kinerja dan anggaran BPBD Kota Malang Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 2.3 T-C. 29 Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah:

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan
yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	27.37%	27.37%

E.II-7

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 Orang	512 Orang	51.20%
3.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	26.17%	26.17%
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	546 Orang	79.13%
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	174 Orang	87.00%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	46.15%	46.15%
7.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	50.00%	50.00%
8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
9.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00%
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75.00%
11.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
12.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0.00%	0.00%
13.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	7 Kali	46.54%
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	0	0.00%
15.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	94.29%	94.29%

E.II-8

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	18 kali	90.00%
17.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	92.45%	92.45%
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	5 Bulan	41.67%
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	477 surat	39.75%
20.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14.80%
21.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	47.79%	47.79%
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	8 jenis	33.33%
23.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	0	0.00%
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	6 Unit	31.58%
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 m2	40 m2	80.00%

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan;

Tabel 2.2
Faktor - faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	27.37%	27.37%	Masih banyak pihak yg ragu2 utk melaksanakan tatap muka secara massal

E.II-9

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialis asi rawan bencana	1.000 Orang	512 Orang	51.20%	Belum banyak Lembaga Pendidikan yang mengajukan permintaan sosialisasi/simulasi
3.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	26.17%	26.17%	Anggaran kurang optimal utk menjangkau seluruh masyarakat sasaran
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	546 Orang	79.13%	Ada pelatihan yang belum terlaksana
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	174 Orang	87.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin saat terjadi bencana
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	46.15%	46.15%	Masih dalam tahap P-RKPD dan Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober
7.	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	50.00%	50.00%	Masih dalam tahap P-RKPD
8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	Masih dalam tahap penyusunan dokumen Rancangan Awal Perubahan Renja Tahun 2022
9.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	25.00%	Masih dalam tahap P-RKPD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin untuk evaluasi bulanan dan triwulan
11.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	SKM dilaksanakan di triwulan III bulan juli - Agustus untuk semester pertama Tahun 2022
12.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0.00%	0.00%	Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober

E.II-10

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Faktor-faktor penyebab belum tercapaiannya target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	7 Kali	46.54%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	0	0.00%	Dokumen laporan keuangan disusun di bulan september - oktober
15.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	94.29%	94.29%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin untuk perjalanan dinas
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	18 kali	90.00%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
17.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	92.45%	92.45%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	5 Bulan	41.67%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	477 surat	39.75%	Kegiatan dilaksanakan secara rutin
20.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	14.80%	Menyesuaikan dengan pengadaan BMD
21.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	47.79%	47.79%	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) banyak dilaksanakan di bulan Juni
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	24 Unit	8 jenis	33.33%	Kegiatan dilaksanakan di triwulan I, II, III, IV
23.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	0	0.00%	Pemeliharaan dilaksanakan pada triwulan III
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	6 Unit	31.58%	Pemeliharaan dilaksanakan pada triwulan II, III
25.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 m2	40 m2	80.00%	Pemeliharaan dilaksanakan pada bulan mei s.d Juni

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Renja tahun 2022 perlu dilakukan:

- a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
- b. Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu memperhatikan faktor eksternal;
- c. Perlu melakukan langkah – langkah koordinatif dan strategis dalam optimalisasi pagu anggaran agar dapat mendanai pencapaian target – target kinerja secara maksimal;
- d. Dilakukan evaluasi setiap triwulan agar rencana yang dilakukan dapat dievaluasi secara berkala agar mencapai target yang ditentukan.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD dan dengan para pemangku kepentingan yang terkait penanggulangan bencana untuk dapat mewujudkan Malang Kota Tangguh Bencana dan sekaligus dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana.

E.II-12

Tabel 2.3

T-C. 29

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Malang
 RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG
 Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III			IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
1	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana		Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%		50.73%		55%		51.84%		54.02%						54.02%		98.22%		54.02%		90.03%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	85	8,140,990,548	98.08	5,223,030,133	90	2,290,713,750	88.29	529,830,074	88.29	548,563,850					88.29	1,078,393,924	101.94%	47.08%	88.29	6,301,424,057	96.27%	77.40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	591,957,000	26.27%	399,105,000	100%	150,000,000	26.53%	32,007,910	27.37%	24,690,000					27.37%	56,697,910	27.37%	37.80%	27.37%	455,802,910	27.37%	77.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	19000	591,957,000	12179	399,105,000	1000	150,000,000	120	32,007,910	392	24,690,000					512	56,697,910	51.20%	37.80%	12691	455,802,910	66.79%	77.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	4,392,530,548	24.46%	2,370,601,715	100%	1,385,713,750	24.90%	196,375,000	26.17%	373,512,750					26.17%	569,887,750	26.17%	41.13%	26.17%	2,940,489,465	26.17%	66.94%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2710	1,567,383,600	9024	1,337,149,000	690	705,280,000	207	114,150,000	339	127,120,000					546	241,270,000	79.13%	34.21%	9570	1,578,419,000	353.14%	100.70%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	22000	928,645,000	26200	348,969,500	20000	290,000,000	27503	70,560,000	28640	70,560,000					28640	141,120,000	143.20%	48.66%	28640	490,089,500	130.18%	52.77%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	400	1,896,501,948	160	684,483,215	50	390,433,750	0	11,665,000	50	175,832,750					50	187,497,750	100.00%	48.02%	210	871,980,965	52.50%	45.98%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

E.II-13

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										I				II													III		IV			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	3,156,503,000	39.94%	2,453,323,418	100%	755,000,000	100%	301,447,164	100%	150,361,100					100.00%	451,808,264	100.00%	59.84%	100.00%	2,905,131,682	100.00%	92.04%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam		1 Jam 59 Menit		< 1 Jam		1 Jam 23 Menit 5 Detik		44 Menit						44 Menit			70.66%		44 Menit		70.66%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	700	2,405,805,000	1514	2,204,345,618	200	580,000,000	188	163,132,164	30	140,741,500					218	303,873,664	109.00%	52.39%	1732	2,508,219,282	247.43%	104.26%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%		42.10%		100%		36.57%		29.98%						29.98%			29.98%		29.98%		29.98%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	700	750,698,000	1596	248,977,800	200	175,000,000	145	138,315,000	29	9,619,600					174	147,934,600	87.00%	84.53%	1770	396,912,400	252.86%	52.87%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																91.59%	50.94%											
				Predikat kinerja																Tinggi	Rendah											
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	80		79.15		79		0		0					0			0.00%		0		0.00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	21,442,023,975	100.00%	9,089,305,593	100%	5,583,834,250	46.15%	958,634,118	46.15%	1,620,089,741					46.15%	2,578,723,859	46.15%	45.79%	46.15%	11,668,029,452	46.15%	54.42%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	1,026,661,000	100%	575,547,141	100%	409,000,000	50%	77,526,552	50%	32,977,745					50.00%	110,504,297	50.00%	27.02%	50.00%	686,051,438	50.00%	66.82%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	6	320,265,000	4	128,279,000	2	52,582,400	1	3,932,000	0	-					1	3,932,000	50.00%	7.48%	5	132,211,000	83.33%	41.28%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	12	200,000,000	12	163,239,041	4	125,000,000	1	28,924,752	0	24,157,745					1	53,082,497	25.00%	42.47%	13	216,321,538	108.33%	108.16%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	6	199,116,000	17	155,782,100	4	124,000,000	3	5,776,600	0	-					3	5,776,600	75.00%	4.66%	20	161,558,700	333.33%	81.14%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

E.II-14

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I				II					III		IV		12 = 8+9+10+11			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16														
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	6	307,280,000	5	128,247,000	2	107,417,600	1	38,893,200	0	8,820,000					1	47,713,200	50.00%	44.42%	6	175,960,200	100.00%	57.26%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	14,282,104,795	85.17%	4,230,544,457	90%	3,847,530,950	0.00%	495,104,013	0.00%	1,294,495,689					0.00%	1,789,599,702	0.00%	46.51%	0.00%	6,020,144,159	0.00%	42.15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	84	13,817,057,995	14	3,945,536,103	14	3,797,530,950	3	478,313,447	4	1,288,919,489					7	1,767,232,936	50.00%	46.54%	21	5,712,769,039	25.00%	41.35%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3	465,046,800	6	285,008,354	1	50,000,000	0	16,790,566	0	5,576,200					0	22,366,766	0.00%	44.73%	6	307,375,120	200.00%	66.10%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	2,126,904,200	130.77%	1,581,079,177	100%	472,303,300	71.43%	203,017,263	94.29%	73,949,701					94.29%	276,966,964	94.29%	58.64%	94.29%	1,858,046,141	94.29%	87.36%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	19,988,400	23	12,838,000	5	10,000,000	5	9,720,663	0	-					5	9,720,663	100.00%	97.21%	28	22,558,663	186.67%	112.86%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	413,142,800	23	279,758,300	5	75,000,000	5	72,595,000	0	-					5	72,595,000	100.00%	96.79%	28	352,353,300	112.00%	85.29%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9	1,347,725,000	9	641,758,050	3	301,303,300	3	99,240,800	3	58,165,201					3	157,406,001	100%	52.24%	12	799,164,051	133.33%	59.30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	6	18,000,000	6	12,995,000	2	6,000,000	2	1,125,000	2	1,520,000					2	2,645,000	100.00%	44.08%	8	15,640,000	133.33%	86.89%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	60	328,048,000	160	633,729,827	20	80,000,000	10	20,335,800	8	14,264,500					18	34,600,300	90.00%	43.25%	178	668,330,127	296.67%	203.73%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	1,388,533,380	138.50%	661,732,976	100%	420,000,000	91.14%	97,759,190	92.45%	96,366,106					92.45%	194,125,296	92.45%	46.22%	92.45%	855,858,272	92.45%	61.64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	36	488,592,900	36	239,107,575	12	145,000,000	2	30,361,050	3	29,946,214					5	60,307,264	41.67%	41.59%	41	299,414,839	113.89%	61.28%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	3600	899,940,480	4986	422,625,401	1200	275,000,000	271	67,398,140	206	66,419,892					477	133,818,032	39.75%	48.66%	5463	556,443,433	151.75%	61.83%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	80,000,000	0	-	100%	15,000,000	0%	1,200,000	100%	400,000					100%	1,600,000	100.00%	10.67%	100%	1,600,000	100.00%	2.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

E.II-15

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	300	80,000,000	0	-	250	15,000,000	0	1,200,000	37	400,000					37	1,600,000	14.80%	10.67%	37	1,600,000	12.33%	2.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	2,537,820,600	98%	2,040,401,842	100%	420,000,000	3.54%	84,027,100	47.79%	121,900,500					47.79%	205,927,600	47.79%	49.03%	47.79%	2,246,329,442	47.79%	88.51%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang yang dipelihara	72	694,571,700	62	727,878,200	24	225,000,000	4	84,027,100	4	27,634,500					8	111,661,600	33.33%	49.63%	70	839,539,800	97.22%	120.87%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	60	42,500,000	0	-	20	20,000,000	0	-	0	-					0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55	379,849,900	49	183,756,000	19	90,000,000	0	-	6	11,730,000					6	11,730,000	31.58%	13.03%	55	195,486,000	100.00%	51.46%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1225	1,420,899,000	1100	1,128,767,642	50	85,000,000	0	-	40	82,536,000					40	82,536,000	80.00%	97.10%	1140	1,211,303,642	93.06%	85.25%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	54.51%	43.59%										
Predikat kinerja																	Rendah	Sangat Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									7,874,548,000		1,488,464,192		2,168,653,591		-		-		3,657,117,783									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	73.05%	47.26%										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	Sedang	Sangat Rendah										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Malang; Tingginya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD.																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana dan melakukan reschedule kegiatan; Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD kepada masyarakat secara formal maupun informal.																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Melakukan evaluasi internal dan memaksimalkan sinkronisasi serta harmonisasi antar Renja SKPD.																												

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

1. Review capaian renja dan membandingkan dengan hasil Analisa kebutuhan penambahan anggaran

Realisasi Anggaran BPBD Kota Malang hingga triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp.3.657.117.783,00. Untuk perubahan anggaran BPBD Kota Malang memerlukan tambahan anggaran di Tahun 2022 sebesar Rp. 1,666,283,856.00, untuk Pengadaan rambu bencana, Pelatihan Digital Marketing Kewirausahaan, Peningkatan kapasitas TRC, Pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana (terpal, bilik bambu, bambu, seng, reng), Gelar Peralatan bencana dan logistik, penyusunan Perwal mitigasi bencana, Pengadaan Pakaian Dinas, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mesin Foto copy dan Mebeulair gedung ex-telecenter), jasa appraisal, Pelatihan komputer, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Pick Up dan Sepeda Motor Personil Kaji Cepat), Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (mesin chainsaw dan mesin pompa banjir) dan Pembangunan Gudang logistik di kantor ex-telecenter.

2. Alasan Proses Penambahan Anggaran

- 1) Tambahan anggaran pengadaan rambu bencana diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana dan untuk menunjang pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Tambahan anggaran untuk Pelatihan Digital Marketing Kewirausahaan diperlukan untuk memberikan keterampilan pemasaran secara online bagi keluarga yang telah menerima bantuan peralatan dan pelatihan kewirausahaan sebelumnya.
- 3) Tambahan anggaran untuk pelatihan kapasitas TRC diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja personil TRC BPBD dalam pelayanan penanggulangan bencana disamping untuk menunjang pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal.
- 4) Tambahan anggaran untuk perlengkapan penanggulangan bencana seperti terpal, bilik bambu, bambu, seng, reng diperlukan untuk kedaruratan bencana dan melokalisir ancaman yang terjadi agar tidak meluas.
- 5) Tambahan anggaran untuk Gelar Peralatan bencana dan logistik diperlukan untuk kesiapan peralatan bencana dan personil BPBD.

- 6) Tambahan Anggaran untuk Penyusunan Peraturan Walikota Malang tentang Mitigasi Bencana.
- 7) Tambahan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas diperlukan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dikarenakan sudah selama 2 tahun terakhir belum mendapatkan pakaian dinas.
- 8) Tambahan anggaran untuk mesin fotokopi diperlukan untuk efisiensi anggaran fotokopi dan Mebeulair gedung ex-telecenter (meja, kursi, sofa, gordyn, AC) diperlukan untuk memfungsikan gedung ex telecenter sebagai gedung BPBD.
- 9) Tambahan anggaran untuk jasa appraisal digunakan untuk penilaian terhadap aset BPBD dan Pelatihan komputer diperlukan untuk meningkatkan kinerja personil BPBD.
- 10) Tambahan anggaran untuk kendaraan dinas (pick up dan sepeda motor) dikarenakan mobil tata yang ada di BPBD sulit untuk operasional dan suku cadang sulit untuk di dapatkan.
- 11) Tambahan anggaran untuk pengadaan mesin chainsaw sangat diperlukan dikarenakan selama ini mesin chainsaw yang dimiliki BPBD kurang dan ada beberapa yang kurang layak. Mesin pompa banjir diperlukan untuk penanganan banjir yang sering terjadi di Kota Malang.
- 12) Tambahan anggaran untuk Pembangunan Gudang logistik di kantor ex-telecenter dikarena perlengkapan dan peralatan banyak dan gudang yang ada kurang luas.

3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Penanggulangan bencana merupakan sebuah isu yang tetap sentral ke depannya mempertimbangkan letak geografis dan kondisi atmosfer Kota Malang yang cenderung rawan akan bencana. Letak geografis Kota Malang yang berada di lembah gunung Kawi, Arjuna, dan Semeru yang dialiri oleh lima sungai/kali besar dan puluhan kali-kali kecil menyebabkan Kota Malang rentan akan bencana banjir. Hal ini masih ditambah dengan kondisi iklim yang cenderung basah karena konsentrasi awan hujan yang terperangkap oleh pegunungan di sekitar Kota Malang dan angin lembah yang memicu cuaca ekstrim dan ditambah lagi dengan perubahan iklim sehingga Kota Malang juga rentan akan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu sudah

semestinya setiap unsur dalam lapisan masyarakat menyadari akan hal ini dan bergerak bersama dalam konsep Pentahelix (Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa) untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan prioritas akan Pengurangan Risiko Bencana dalam dimensi Pembangunan Berkelanjutan.

Berkenaan dengan upaya menciptakan kolaborasi optimal multi pihak dalam penanggulangan bencana perlu disadari bahwa peran pemerintah selaku motor penggerak, regulator, dan dinamisator haruslah didukung oleh political will dan kebijakan anggaran yang memadai di level pimpinan daerah karena dua hal itu akan mendorong pada peningkatan kualitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang mengampu bidang urusan Penanggulangan Bencana. Political will yang kuat yang berlatar belakang pemahaman yang mencukupi akan pentingnya aspek pengurangan risiko bencana akan secara langsung berdampak positif terhadap kinerja organisasi BPBD karena jika upaya-upaya penanggulangan bencana sudah menjadi prioritas pembangunan daerah maka kapasitas organisasi perangkat daerah berkenaan termasuk diantaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan anggarannya akan diperhatikan dan disediakan secara optimal. Kedua hal ini akan memberikan daya ungkit maksimal terhadap kinerja perangkat daerah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan mandatory untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan

Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II bulan Mei pada BPBD Kota Malang belum menggembirakan karena belum mencapai target atau bahkan masih jauh dari target yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat tabel 2.3). Adapun tidak tercapainya target dimaksud disebabkan karena dua hal yakni kurangnya dukungan anggaran dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksananya.

Dukungan anggaran, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan SPM dimaksud membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Kesemua aktifitas tersebut haruslah dapat mengcover seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut.

Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada BPBD Kota Malang yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana, padahal penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai contoh pada tahapan prabencana yang tugas pokoknya ada pada aspek pengurangan risiko bencana yang selama ini diampu oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana diperlukan sumber daya manusia yang memahami perencanaan wilayah mengingat rentang tugasnya mulai dari penyusunan kajian risiko, pelaksanaan penyebaran informasi, pemantauan bencana, koordinasi multipihak, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menurunkan risiko bencana di tingkat kota. Faktanya sampai dengan saat ini penetapan personil Aparatur Sipil Negara yang bertugas di BPBD Kota Malang belum memperhatikan kebutuhan dalam optimalisasi penerapan tugas dan fungsi baik dari segi latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman sehingga berpengaruh secara langsung dalam lemahnya kinerja organisasi BPBD dan minimnya capaian target SPM. Lemahnya kompetensi aparatur masih ditambah dengan minimnya kuantitas personil yang ada di perangkat daerah yang mengampu sub urusan bencana ini sehingga walaupun telah diupayakan dipenuhi melalui tenaga non PNS namun berhubung kemampuan anggaran yang terbatas maka sangat terbatas pula ketersediaan sumber daya manusia yang bisa dipenuhi melalui jalur non PNS tersebut.

4. Kami lampirkan tabel berikut, Tabel 2.2:

TABEL 2.2
ANALISA KEBUTUHAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					7,874,548,000.00	3,657,117,783.00				9,540,831,856.00		
I	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	88.29	2,290,713,750.00	1,078,393,924.00	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	2,667,893,262.00		
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	27.37%	150,000,000.00	56,697,910.00	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	214,506,000.00		
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 Orang	512 Orang	150,000,000.00	56,697,910.00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 orang	214,506,000.00		
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	26.17%	1,385,713,750.00	569,887,750.00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,522,575,750.00		
2)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	546 Orang	705,280,000.00	241,270,000.00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	605,564,000.00		
3)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	28.640 Orang	290,000,000.00	141,120,000.00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	285,960,000.00		
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	110 unit	94,000,000.00	pengadaan rambu titik kumpul, jalur evakuasi, rambu tanah longsor, jalur evakuasi tangga.	

E.II-22

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target (4)	Realisasi (5)	Target (6)	Realisasi (7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5)	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	50 KK	50KK	390,433,750.00	187,497,750.00	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	150 KK	487,051,750.00	Pelatihan Digital Marketing Kewirausahaan sebanyak 100 KK	
6)	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	50,000,000.00	Peningkatan kapasitas TRC	
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	755,000,000.00	451,808,264.00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	897,561,512.00		
		Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	44 Menit				Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam			
7)	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	218 Orang	580,000,000.00	303,873,664.00	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	568,840,000.00		
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	29.98%				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%			
8)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	174 Orang	175,000,000.00	147,934,600.00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	328,721,512.00	Pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana (terpal, bilik bambu, bambu, seng, reng), Sembako dan Gelar Peralatan bencana dan logistik	
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	-	-	-	-	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	50%	33,250,000.00		
9)	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	1 Dokumen	33,250,000.00	Penyusunan Perwal Mitigasi Bencana	

E.II-23

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target (4)	Realisasi (5)	Target (6)	Realisasi (7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			79						79			
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	46.15%	5,583,834,250.00	2,578,723,859.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	6,872,938,594.00		
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	50.00%	409,000,000.00	110,504,297.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	364,498,100.00		
10)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	52,582,400.00	3,932,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	50,161,000.00		
11)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000.00	53,082,497.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	109,415,500.00		
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	124,000,000.00	5,776,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	105,586,000.00		
13)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	107,417,600.00	47,713,200.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	99,335,600.00		
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	0.00%	3,847,530,950.00	1,789,599,702.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	3,933,436,594.00		
14)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	7 Kali	3,797,530,950.00	1,767,232,936.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	3,886,436,594.00	Tambahan TPP	
15)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	0	50,000,000.00	22,366,766.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	47,000,000.00		

E.II-24

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	63,000,000.00		
16)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	105 Buah	63,000,000.00	Pengadaan 60 stel seragam, 15 sepatu boots TRC, 30 jas hujan TRC	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	94.29%	472,303,300.00	276,966,964.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	1,059,696,300.00		
17)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,000,000.00	9,720,663.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	10,000,000.00		
18)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	75,000,000.00	72,595,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Jenis	608,328,000.00	Pengadaan Mesin Fotokopi dan Mebeulair gedung ex-telecenter.	
19)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	301,303,300.00	157,406,001.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	362,098,300.00		
20)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	6,000,000.00	2,645,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 Jenis	6,000,000.00		
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	18 Kali	80,000,000.00	34,600,300.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	73,270,000.00		
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	92.45%	420,000,000.00	194,125,296.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	417,980,000.00		
22)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	5 Bulan	145,000,000.00	60,307,264.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	145,000,000.00		

E.II-25

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	477 Surat	275,000,000.00	133,818,032.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	272,980,000.00		
10	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	15,000,000.00	1,600,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	76,931,300.00		
24)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	37 Unit	15,000,000.00	1,600,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	76,931,300.00	tambahan anggaran untuk jasa appraisal dan Pelatihan komputer	
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	-	-	-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	533,000,000.00		
25)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	3 Unit	235,000,000.00	Pengadaan Mobil Pick Up dan sepeda motor personil kaji cepat	
26)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	2 unit	80,000,000.00	Pengadaan mesin chainsaw, mesin pompa banjir	
27)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	80 m2	218,000,000.00	Pembangunan Gudang logistik di kantor ex-telecenter	
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	47.79%	420,000,000.00	205,927,600.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	424,396,300.00		
28)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	8 Unit	225,000,000.00	111,661,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	247,588,300.00		

E.II-26

No.	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	0	20,000,000.00	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	20,000,000.00		
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	6 Unit	90,000,000.00	11,730,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	47,730,000.00		
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 m2	40 m2	85,000,000.00	82,536,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	86 m2	109,078,000.00		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2022	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2022	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Keterangan	
											Pada APBD TA 2022	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
											7,874,548,000.00	7,921,793,644.00	47,245,644.00					
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana dibagi jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana dikali seratus persen	55%	1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	2,290,713,750.00	2,207,663,750.00	(83,050,000.00)				
				1	05	03	2	01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	150,000,000.00	138,040,000.00	(11,960,000.00)				
				1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1.000 orang	150,000,000.00	138,040,000.00	(11,960,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	03	2	02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,385,713,750.00	1,331,843,750.00	(53,870,000.00)			
				1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	705,280,000.00	682,030,000.00	(23,250,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20.000 Orang	290,000,000.00	285,960,000.00	(4,040,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	110 unit	-	-	-	Baru	Kota Malang	pengadaan rambu titik kumpul, jalur evakuasi, rambu tanah longsor, jalur evakuasi tangga.
				1	05	03	2	02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	150 KK	390,433,750.00	363,853,750.00	(26,580,000.00)	Berubah	Kota Malang	Pelatihan Digital Marketing Kewirausahaan sebanyak 100 KK

E.III-29

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2022	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2022	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Keterangan		
										Pada APBD TA 2022	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				1	05	03	2	02	08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	-	-	-	Baru	Kota Malang	Peningkatan kapasitas TRC
				1	05	03	2	03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	755,000,000.00	737,780,000.00	(17,220,000.00)			
										Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam			-				
				1	05	03	2	03	03	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	580,000,000.00	568,840,000.00	(11,160,000.00)	Berubah	Kota Malang	
										Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%			-				
				1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	175,000,000.00	168,940,000.00	(6,060,000.00)	Berubah	Kota Malang	Pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana (terpal, bilik bambu, bambu, seng, reng) dan Gelar Peralatan bencana dan logistik
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	79									79			-			
				1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	5,583,834,250.00	5,714,129,894.00	130,295,644.00			
				1	05	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	409,000,000.00	364,498,100.00	(44,501,900.00)			
				1	05	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	52,582,400.00	50,161,000.00	(2,421,400.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	125,000,000.00	109,415,500.00	(15,584,500.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	124,000,000.00	105,586,000.00	(18,414,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	107,417,600.00	99,335,600.00	(8,082,000.00)	Berubah	Kota Malang	

E.III-30

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2022	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2022	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Keterangan		
										Pada APBD TA 2022	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90%	3,847,530,950.00	3,933,436,594.00	85,905,644.00			
				1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	3,797,530,950.00	3,886,436,594.00	88,905,644.00	Berubah	Kota Malang	Tambahan TPP
				1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	50,000,000.00	47,000,000.00	(3,000,000.00)	Tetap	Kota Malang	
				1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	-	-	-			
				1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	105 Buah	-	-	-	Baru	Kota Malang	Pengadaan 60 stel seragam, 15 sepatu boots TRC, 30 jas hujan TRC
				1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	472,303,300.00	551,887,600.00	79,584,300.00			
				1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Tetap	Kota Malang	
				1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Jenis	75,000,000.00	182,016,800.00	107,016,800.00	Berubah	Kota Malang	Pengadaan Mesin Fotokopi dan Mebeulair gedung ex-telecenter.
				1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	301,303,300.00	283,098,300.00	(18,205,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	2 Jenis	6,000,000.00	3,502,500.00	(2,497,500.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	80,000,000.00	73,270,000.00	(6,730,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	420,000,000.00	417,980,000.00	(2,020,000.00)			
				1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 Bulan	145,000,000.00	145,000,000.00	-	Tetap	Kota Malang	
				1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	1.200 surat	275,000,000.00	272,980,000.00	(2,020,000.00)	Berubah	Kota Malang	

E.III-31

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2022	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2022	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Keterangan		
										Pada APBD TA 2022	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				1	05	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	15,000,000.00	21,931,300.00	6,931,300.00			
				1	05	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	15,000,000.00	21,931,300.00	6,931,300.00	Berubah	Kota Malang	tambahan anggaran untuk jasa appraisal dan Pelatihan komputer
				1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMMD	100%	-	-	-			
				1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	3 Unit	-	-	-	Baru	Kota Malang	Pengadaan Mobil Pick Up dan sepeda motor personil kaji cepat
				1	05	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	2 Unit	-	-	-	Baru	Kota Malang	Pengadaan mesin chainsaw dan mesin pompa banjir
				1	05	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luas gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	80 m2	-	-	-	Baru	Kota Malang	Pembangunan Gudang logistik di kantor ex-telecenter
				1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	420,000,000.00	424,396,300.00	4,396,300.00			
				1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	24 Unit	225,000,000.00	247,588,300.00	22,588,300.00	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Tetap	Kota Malang	
				1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	90,000,000.00	47,730,000.00	(42,270,000.00)	Berubah	Kota Malang	
				1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	86 m2	85,000,000.00	109,078,000.00	24,078,000.00	Berubah	Kota Malang	

BAB IV
PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Bahwa penanggulangan bencana merupakan sektor yang masuk dalam urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang merupakan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar sehingga sangat perlu untuk mendapat perhatian yang utama dalam kebijakan anggaran dan penguatan kapasitas personilnya;
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya, terkait dengan hal ini untuk sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) SPM yang wajib untuk dipenuhi dan didukung pendanaannya secara optimal yaitu: a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana. Oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan SPM ini perlu untuk mendapatkan penguatan secara internal maupun eksternal.

4.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana RKPD ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Malang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Malang;
2. Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Malang Tahun 2022 ini sudah merujuk kepada Perubahan Rencana Strategis BPBD Kota

Malang tahun 2019 - 2023 yang telah diverifikasi oleh Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pergeseran – pergeseran anggaran antar sub kegiatan yang merupakan langkah optimalisasi anggaran harus dimaksimalkan penerapannya pada awal triwulan IV;
2. Seluruh pengeluaran anggaran harus mengikuti kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan negara yakni dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.